

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Langkah - Langkah Penelitian	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA FUNGSI DAN WEWENANG PPTK

DALAM PENYERAPAN APBD PEMERINTAHAN PROVINSI

JAWA BARAT	28
A. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	28
1. Definisi Aparatur Sipil Negara	28
2. Tujuan Aparatur Sipil Negara	31
3. Prinsip Dasar Aparatur Sipil Negara	32
4. Sistem Merit Aparatur Sipil Negara	32
5. Perbedaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Pokok Kepegawaian	33
6. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	34
7. Jenis, Status dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara	35
8. Fungsi dan Peranan Pegawai ASN	35
9. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	36
10. Jabatan Aparatur Sipil Negara	36
11. Kelembagaan dalam Kebijakan dan Manajemen ASN	38
a. Kelembagaan dalam Kebijakan	38
b. Manajemen ASN dan PPPK	39
12. Pegawai ASN Yang Menjadi Pejabat Negara	42
13. Organisasi ASN (Pasal 126)	42
14. Sistem Informasi ASN	43

15. Ketentuan Peralihan Penyetaraan Jabatan	43
B. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pelaksana Teknis	
Kegiatan (PPTK)	44
1. Definisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	44
2. Landasan Hukum PPTK	45
3. Tugas, Peran dan Tanggungjawab PPTK	50
4. Perbedaan Tugas Pokok dan Kewenangan PPK dengan PPTK ...	51
C. Tinjauan Umum Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja	
Daerah (APBD)	56
1. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	56
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja	
Daerah (APBD)	60
a. Sumber Keuangan Daerah	61
b. Hubungan Antara Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat	
dan Daerah	63
c. Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Provinsi	
Dengan Kabupaten/Kota	63
d. Mekanisme Penyusunan APBD	64
e. Teknis Penyusunan APBD	65
f. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD	66
g. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	69

BAB III FUNGSI DAN WEWENANG PPTK DALAM PENYERAPAN

APBD PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 71

- A. Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan PPTK dalam penyerapan
APBD Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 71
- B. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka
pemenuhan Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi
kompetensi PPTK untuk penyerapan APBD 77
- C. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menjamin
perlindungan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk
sebagai PPTK dalam rangka penyerapan APBD 88

BAB IV PENUTUP 90

- A. Kesimpulan 90
- B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN 100